




Presentation of Financial Statements, Internal Control System, Accessibility of Financial Statements and Performance Audit on The Accountability of Regional Financial Management

Mardika Pramudianti , Wawan Sadtyo Nugroho

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

 mardikaap96@gmail.com

 <https://doi.org/10.53017/ujeb.203>

Received: 17/02/2022

Revised: 25/03/2022

Accepted: 27/03/2022

Abstract

This study aims to empirically test and analyze the effect of presentation of financial statements, internal control system, accessibility of financial statements and performance audit on the accountability of regional financial management. The research population is all regional organization in Magelang District. Based on the sampling method using purposive sampling, a sample of 26 regional organization in Magelang District. Hypothesis testing was performed using multiple linear regression analysis. The results showed that the presentation of financial statements had no effect on the accountability of regional financial management, internal control system had a positive effect on the accountability of regional financial management, accessibility of financial statements had no effect on the accountability of regional financial management and performance audit ad a positive effect on the accountability of regional financial management.

Keywords: *Presentation of financial statements; Internal control system; Accessibility of financial statements; Performance audit; Accountability of regional financial management*

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi penelitian adalah seluruh OPD di Kabupaten Magelang. Berdasarkan metode pengambilan sampel dengan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 26 OPD di Kabupaten Magelang. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Penyajian laporan keuangan; Sistem pengendalian internal; Aksesibilitas laporan keuangan; Audit kinerja; Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

1. Pendahuluan

Di Indonesia, dasar utama yang digunakan dalam Pengelolaan Keuangan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui menjadi Permendagri No. 13 tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aktivitas pelaksanaan, pengawasan, perencanaan, pengendalian pelaporan serta evaluasi [1]. Akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan undang-undang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan bentuk perwujudan dari pertanggungjawaban atas pengendalian sumber daya yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan [2].

Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang paling penting karena dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi, menilai dan memprediksi suatu kinerja instansi pemerintah. Pemerintah daerah harus dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, selain itu pemerintah harus menyajikan informasi laporan keuangan secara jelas. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah [3]. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3).

Tabel 1. Opini BPK Se-Kedu

Nama Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Kebumen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Wonosobo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 2. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Se-Kedu

Nama Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Magelang	CC	CC	CC	B	B
Kota Magelang	B	B	B	B	B
Kabupaten Temanggung	CC	BB	CC	B	B
Kabupaten Purworejo	CC	B	B	B	B
Kabupaten Kebumen	CC	CC	CC	B	B

Tabel 3. Tingkat Kasus Korupsi Se-Kedu

Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	Total Kasus
Kabupaten Magelang	3	2	1	6 kasus
Kota Magelang	3	2	0	5 kasus
Kabupaten Temanggung	2	2	1	5 kasus
Kabupaten Purworejo	0	2	1	3 kasus
Kabupaten Kebumen	2	1	1	4 kasus
Kabupaten Wonosobo	1	2	1	4 kasus

Permasalahan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang adalah masih rendahnya akuntabilitas kinerja yang di dapat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Kurun waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Magelang mendapat ranking CC selama 3 tahun berurut-urut pada tahun 2016 hingga 2018, pada tahun 2019 hingga 2020 Kabupaten Magelang mendapat ranking B serta Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mendapatkan urutan tertinggi dalam tingkat kasus korupsi regional Kedu.

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Sabriani dan Rahayu [4] tentang “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Kota Tasikmalaya”. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal ditemukan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah **pertama**, adanya penambahan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Audit Kinerja. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Audit Kinerja termasuk ke dalam mekanisme jenis *monitoring* yang terdapat di dalam teori agensi, sedangkan variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal termasuk ke dalam mekanisme jenis *bonding*. Menurut [5] menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan pada Kabupaten Magelang sudah cukup baik, karena para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mengakses Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada web yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kedua, adanya perbedaan pada objek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang. Alasan dilakukan penelitian ini pada Pemerintah Kabupaten Magelang karena selama lima tahun terakhir Kabupaten Magelang mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hal tersebut merupakan sebuah prestasi. Dalam lima tahun mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, Pemerintah Kabupaten Magelang masih mendapatkan ranking cukup rendah selama 5 tahun terakhir pada akuntabilitas kinerja dan berada pada urutan tertinggi Se-Kedu dalam tingkat kasus korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Harapannya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ekonomi dan lingkungan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Magelang semakin memperhatikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Literatur Review

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal [6]. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

2.2. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah [7]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan penyajian laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

2.3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan [8].

2.4. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya.

2.5. Audit Kinerja

Audit Pemerintah, khususnya Audit Kinerja merupakan kunci utama untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pertanggungjawaban kepada rakyat. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas [5]. Fungsi yang melakukan aktivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Audit kinerja dapat dilaksanakan oleh external auditor maupun internal auditor.

2.6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya [9].

Akuntabilitas dapat tercipta dalam suasana transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

3. Metode

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Menurut Ghozali [10] teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah OPD di Kabupaten Magelang. Adapun kriterianya sebagai berikut:

- a. Dinas/Badan/Kantor yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang
- b. Kepala OPD yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
- c. Pegawai OPD Bagian Keuangan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

3.2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang berupa kuesioner yang disebar ke 26 OPD di Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan kuesioner.

3.3. Alat Analisis Data

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewness* [10].

3.4. Uji Kualitas Data

3.4.1. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut [10]. Uji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai *undimensionalitas* atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

3.4.2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama, uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

3.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda yaitu suatu model statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model ini dipilih untuk mengetahui hubungan variabel terikat dengan variabel bebasnya serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) baik secara parsial maupun secara simultan. Berdasarkan variabel independen dan dependen tersebut, maka dapat disusun persamaan analisis regresi linier sebagai berikut [10]:

$$APKD = \alpha + \beta_1 PLK + \beta_2 SPI + \beta_3 ALK + \beta_4 AK + e \quad (1)$$

3.6. Pengujian Hipotesis

3.6.1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen [10]. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas.

3.6.2. Uji f

Digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak Ghozali [10]. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k-1$ dan derajat kebebasan penyebut $df = n-k$ di mana k adalah jumlah variabel bebas. Kriteria dalam uji F yaitu:

- Jika F hitung $> F$ tabel dan tingkat $\alpha < 0.05$, maka model penelitian dapat dikatakan cocok.
- Jika F hitung $< F$ tabel dan tingkat $\alpha > 0.05$, maka model penelitian dapat dikatakan tidak cocok.

3.6.3. Uji t

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriteria pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan statistik t sebagai berikut:

- Jika t hitung $> t$ tabel, atau p value $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen
- Jika t hitung $< t$ tabel, atau p value $> \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Sampel Penelitian

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pegawai di OPD se-Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Kuesioner ditujukan kepada pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan, kepala subbagian keuangan, staf pencatatan keuangan, dan staf pemegang kas OPD. Kuesioner yang disebar sebanyak 115 kuesioner. Jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 112 responden (Tabel 4).

Tabel 4. Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian

Uraian	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan	115
Kuesioner yang kembali	112
Kuesioner yang tidak kembali	(3)
Jumlah kuesioner yang diolah	112
Tingkat pengembalian kuesioner	97,4%
Tingkat pengembalian yang dapat diolah	97,4%

4.2. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif didapatkan informasi bahwa jumlah N atau sampel sebanyak 112, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviation
Penyajian Laporan Keuangan	112	4,00	5,00	4,13	0,342
Sistem Pengendalian Internal	112	3,00	5,00	4,13	0,367
Aksesibilitas Laporan Keuangan	112	2,00	5,00	3,79	0,522
Audit Kinerja	112	3,00	5,00	4,11	0,388
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	112	4,00	5,00	4,20	0,399

4.3. Uji Kualitas Data

4.3.1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pengujian pada tabel dapat diketahui bahwa jumlah N atau sampel yang diuji adalah sebanyak 112 sampel. Berdasarkan pengujian CFA, maka hasil *cross loading* menunjukkan bahwa indikator-indikator dengan nilai *cross loading* > 0,50 adalah valid (**Tabel 6**).

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	PLK	SPI	ALK	AK	APKD	Keterangan
PLK 1	0,923					Valid
PLK 2	0,852					Valid
PLK 3	0,877					Valid
PLK 4	0,825					Valid
PLK 5	0,842					Valid
PLK 6	0,599					Valid
PLK 7	0,832					Valid
PLK 8	0,808					Valid
SPI 1		0,738				Valid
SPI 2		0,656				Valid
SPI 3		0,810				Valid
SPI 4		0,765				Valid
SPI 5		0,824				Valid
SPI 6		0,826				Valid
SPI 7		0,871				Valid
SPI 8		0,778				Valid
SPI 9		0,918				Valid
SPI 10		0,816				Valid
SPI 11		0,906				Valid
SPI 12		0,914				Valid
SPI 13		0,602				Valid
SPI 14		0,807				Valid
ALK 1			0,562			Valid
ALK 2			0,638			Valid
ALK 3			0,500			Valid
AK 1				0,895		Valid
AK 2				0,865		Valid
AK 3				0,805		Valid
AK 4				0,845		Valid
AK 5				0,847		Valid
APKD 1					0,886	Valid
APKD 2					0,787	Valid
APKD 3					0,861	Valid

4.3.2. Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas (Tabel 7) untuk semua variabel nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 sehingga semua variabel penelitian ini dinyatakan reliabel.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
PLK	0,875	Reliabel
SPI	0,913	Reliabel
ALK	0,781	Reliabel
AK	0,823	Reliabel
APKD	0,815	Reliabel

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis regresi linear berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,906	1,082		0,838	0,404
PLK	0,051	0,047	0,116	1,074	0,285
SPI	0,069	0,031	0,271	2,221	0,028
ALK	0,004	0,50	0,005	0,079	0,938
AK	0,291	0,057	0,452	5,089	0,000

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel hasil analisis regresi linear berganda (Tabel 8) maka persamaan regresinya adalah:

$$APKD = 0,906 + 0,051PLK + 0,069SPI + 0,004ALK + 0,291AK + e \quad (2)$$

4.5. Pengujian Hipotesis

4.5.1. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil uji koefisien determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,76	0,578	0,562	0,742

Berdasarkan hasil pengujian *R Square* pada Tabel 9 besarnya Adjusted R Square adalah 0,562. Hal ini berarti bahwa variabel penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja mampu menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 56,20%, sedangkan sisanya 43,80% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini.

4.5.2. Uji f

Tabel 10. Hasil uji f

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	80,734	4	20,183	36,638	0,000
Residual	58,945	107	0,551		
Total	139,679	111			

Berdasarkan hasil pengujian uji F (Tabel 10) menunjukkan nilai Fhitung sebesar 36,63 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Jumlah $n = 112$ dan $k = 4$ maka $df1 = 4$ ($k - 1$) dan $df2 = 107$ ($n - k$) serta didapat Ftabel sebesar 2,46. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan pada penelitian ini layak atau *fit*.

4.5.3. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil statistik uji t ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil uji t

	B	thitung	Sig.	Ttabel	Keterangan
PLK	0051	1,074	0,285	1,982	H1 tidak diterima
SPI	0,069	2,221	0,028	1,982	H2 diterima
ALK	0,004	0,079	0,938	1,982	H3 tidak diterima
AK	0,291	5,089	0,000	1,982	H4 diterima

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang sudah mencakup elemen karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti: andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan sehingga responden yang ada pada OPD Kabupaten Magelang telah memenuhi karakteristik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tanpa perlu adanya tekanan atau *treatment* tertentu dari pihak-pihak lain.

Terkait penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila penyajian laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka tidak semua transaksi keuangan disajikan ke dalam laporan keuangan dengan jujur.

Kesimpulan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [4] yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh [7] yang menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.6.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang telah dilaksanakan dengan baik dan optimal sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat.

Terkait penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terciptanya sistem pengendalian internal dapat mengatasi permasalahan asimetri informasi di akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dikarenakan semua aktivitas harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan penelitian [4] yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh [3] yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.6.3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang tidak dipengaruhi oleh aksesibilitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan Pemerintah

Kabupaten Magelang tidak memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang hanya menyediakan informasi laporan keuangannya melalui website atau laman resmi milik Pemerintah Kabupaten Magelang serta masih ada beberapa tahun atau beberapa elemen laporan keuangan Pemerintah Kabupaten yang belum lengkap pada laman tersebut.

Terkait penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang selaku *agent* harus dapat memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan meninformasikan segala kegiatan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat selaku *principal*.

Kesimpulan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [7] yang menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh [3] yang menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.6.4. Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa audit kinerja terutama dibagian yang langsung berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pegawai yang secara langsung meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Terkait penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin baik audit kinerja maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terciptanya audit kinerja dapat mengatasi permasalahan asimetri informasi di akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dikarenakan semua aktivitas harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan penelitian [11] yang menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja pada OPD Kabupaten Magelang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 112 pegawai yang melaksanakan tata usaha akuntansi/keuangan pada OPD yang terdiri dari Kepala Dinas, Kasubag Keuangan, Staff Keuangan atau Akuntansi, Bendahara, Kasie Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal dan audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sementara variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sudah dilakukan secara optimal sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga sudah terpenuhi. Audit kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang telah memenuhi aspek efisiensi, ekonomis dan efektif sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi aspek tersebut. Penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang telah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tanpa perlu adanya tekanan ataupun tuntutan dari pihak-pihak luar. Aksesibilitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang masih cukup rendah, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Magelang belum memberikan kemudahan akses kepada pihak di luar Pemerintah Kabupaten Magelang terutama pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

- a. Alloh SWT. Penulis sangat bersyukur atas segala nikmat dan rahmat-Nya.
- b. Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing, yang telag bersedia waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penelitian ini.
- c. Bapak Sigit Haryadi dan Ibu Yekti Handayani atas doa dan dukungan selama penelitian.
- d. Keluarga besar Yosodimedjo yang senantiasa mendoakan kelancaran selama penelitian.

References

- [1] BPK RI, "Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah." 2005.
- [2] R. P. Sari, C. S. Mulyani, and D. S. Budiarto, "Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, vol. 6, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.26486/jramb.v6i1.697.
- [3] S.- Hermanto, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa," *Kajian Akuntansi*, vol. 20, no. 2, pp. 211–218, 2019, doi: 10.29313/ka.v20i2.4928.
- [4] A. A. Sabriani and S. Rahayu, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, vol. 5, no. 2, pp. 14–23, 2020.
- [5] M. Mudjiyono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 2019.
- [6] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure," *Journal of financial economics*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976.
- [7] A. C. Dewi and T. Mildawati, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.*, vol. VII, 2018.
- [8] E. W. Sari, N. Azlina, and J. Julita, "Pengaruh sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan gaya kepemimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu." Riau University, 2017.
- [9] E. P. Firstcilia, "(Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau) Oleh : Firstcilia Eldy Putri Pembimbing : Yuneita Anisma dan Al Azhar A," no. 32, 2017.
- [10] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [11] R. T. Yenita and A. Subardjo, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.*, vol. VII, 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)